



Peran Afrika Selatan Mempengaruhi Masyarakat Global melalui Media dan Organisasi Internasional Studi Kasus Palestina-Israel

Jasuma Hartias Iqhwat Almiyudha¹, Novriest Umbu Walangara Nau², Roberto Octavianus Cornelis Seba³.

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

*Korespondensi: iqhwat123@gmail.com

Info Artikel

Diterima 29
Desember 2024

Disetujui 26
Januari 2025

Dipublikasikan 12
Februari 2025

Keywords:
Peran Afrika
Selatan; Media
Internasional;
Organisasi
Internasional

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Peran Afrika Selatan dalam mendukung Palestina, dengan fokus pada hubungan sejarah dan solidaritas yang terjalin antara kedua pihak. Penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub-bab yang mencakup konteks politik dan sosial Afrika Selatan, hubungan bilateral dengan Palestina, serta peran media dan organisasi internasional dalam mendukung perjuangan Palestina. Afrika Selatan, setelah mengakhiri apartheid, menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina pada tahun 1995, menunjukkan komitmennya terhadap hak-hak Palestina. Pemimpin ANC, Nelson Mandela, menegaskan bahwa kebebasan Afrika Selatan tidak lengkap tanpa kebebasan Palestina. Dukungan ini berlanjut di era kepemimpinan saat ini, di mana pemerintah Afrika Selatan mengajukan kasus genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional dan aktif dalam gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS). Media Afrika Selatan berperan penting dalam membentuk opini publik dan kebijakan luar negeri terkait isu Palestina. Dengan dukungan kuat dari masyarakat, Afrika Selatan berupaya menjadi suara bagi negara-negara berkembang di panggung global. Penelitian ini menyoroti bagaimana pengalaman bersama dalam perjuangan melawan penindasan telah memperkuat ikatan antara Afrika Selatan dan Palestina, serta tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi rakyat Palestina.

Abstract

Africa's role in supporting Palestine, focusing on the historical ties and solidarity between the two entities. The research is structured into several sections, including the political and social context of South Africa, bilateral relations with Palestine, and the influence of media and international organizations in supporting the Palestinian cause. South Africa, after ending apartheid, established diplomatic relations with Palestine in 1995, demonstrating its commitment to Palestinian rights. ANC leader Nelson Mandela emphasized that South Africa's freedom is incomplete without Palestinian freedom. This support continues under the current leadership, with the South African government filing a genocide case against Israel at the International Court of Justice and actively participating in the Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement. The South African media plays a crucial role in shaping public opinion and foreign policy regarding Palestine. With strong backing from society, South Africa aims to be a voice for developing nations on the global stage. This study highlights how shared experiences in the struggle against oppression have strengthened the bond between South Africa and Palestine and addresses the ongoing challenges in achieving justice and peace for the Palestinian people.

1. Pendahuluan

Konflik Palestina-Israel telah menjadi topik berita global yang menonjol karena meningkatnya kekerasan antara Israel dan Hamas di Gaza baru-baru ini. Konflik tersebut telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan harta benda di kedua belah pihak, dengan lebih dari 2.300 korban jiwa dan 8.900 orang cedera dilaporkan (Salma, 2023). Perkembangan utama dalam konflik tersebut termasuk perang Israel-Hamas, yang dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangan terhadap Israel di selatan Jalur Gaza. Sejak itu, Israel telah melakukan kampanye udara dan operasi darat di Gaza, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah korban jiwa dan pengungsian warga sipil (Sky News, 2024). Upaya gencatan senjata telah dilakukan secara aktif oleh Amerika Serikat, dengan Presiden Joe Biden mengusulkan rencana gencatan senjata yang mencakup pembebasan sandera Israel yang ditahan oleh Hamas. Namun, kedua belah pihak enggan menyetujui persyaratan tersebut, sehingga mengakibatkan kekerasan terus berlanjut (Center for Preventive Action, 2024). Komunitas internasional telah menyatakan keprihatinannya atas krisis kemanusiaan di Gaza, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan akan terjadinya malnutrisi akut pada ribuan anak.

Konsensus internasional telah menetapkan solusi dua negara, dengan membayangkan Tepi Barat dan Gaza sebagai negara berdaulat Palestina. Banyak warga Israel yang mendukung gagasan ini, namun masih ada kekhawatiran bahwa kemerdekaan Palestina dapat mengancam keberadaan Israel. Kondisi yang tidak adil bagi warga Palestina terus berlanjut, dengan Israel enggan menerima status quo hingga terjadinya serangan tanggal 7 Oktober. Warga Palestina mempunyai hak atas kehidupan yang layak, dengan kebebasan dan nasib mereka terjamin. Mereka menginginkan kemerdekaan dengan alasan yang sama seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi: mereka tidak dapat bergantung pada negara lain untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini menimbulkan dilema yang tragis, karena baik Palestina maupun Israel mempunyai klaim yang sah. Tantangannya adalah mencapai aspirasi tersebut secara bersamaan di tengah kurangnya kepercayaan. Komunitas internasional harus turun tangan untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Amerika Serikat, sebagai pemimpin dunia bebas secara de facto, harus menyelenggarakan konferensi perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mengatasi ketidakadilan dalam sejarah.

Koalisi global harus membentuk kekuatan internasional untuk membangun kembali Gaza dan mengembangkan Tepi Barat, yang memerlukan sumber daya, keahlian, dan kehadiran militer yang signifikan untuk menjaga perdamaian. Daripada mendanai perang yang sedang berlangsung, investasi harus fokus pada pembangunan kehidupan yang aman, bebas, dan adil bagi warga Palestina dan Israel. Bisa dibayangkan, warga Palestina berhak mendapatkan reparasi atas ketidakadilan historis yang mereka hadapi. Para pemimpin dunia harus mengakui bahwa keamanan dan kemakmuran global berkaitan dengan kesejahteraan semua orang. Perdamaian sejati menuntut keadilan bagi seluruh umat manusia. Dominasi memicu konflik; pembebasan dapat mengakhirinya. Momen ini harus dilihat sebagai peluang untuk menciptakan tatanan dunia baru berdasarkan kesetaraan, penentuan nasib sendiri, dan hak hidup bagi semua orang (Pinto, 2024). Dalam konteks konflik Palestina-Israel, kedua belah pihak aktif memanfaatkan media internasional untuk mempromosikan narasi mereka dan mempengaruhi opini global. Kampanye media

yang luas diluncurkan oleh kelompok Palestina dan Israel untuk membentuk persepsi publik dan mempengaruhi opini internasional.

Melalui media sosial, outlet berita tradisional, dan berbagai bentuk konten digital, masing-masing pihak berupaya menyajikan perspektif mereka, menyoroti keluhan, dan mendapatkan simpati serta dukungan dari komunitas global. Selain itu, konflik Palestina-Israel menjadi isu penting di berbagai forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana kedua belah pihak berusaha mempengaruhi resolusi dan keputusan melalui upaya diplomatik dan tekanan publik. Perwakilan Palestina sering mengajukan banding pada hukum internasional dan wacana hak asasi manusia untuk mendapatkan dukungan, sementara diplomat Israel bekerja untuk menanggapi upaya ini dengan menekankan masalah keamanan dan klaim historis. Opini publik juga memainkan peran penting dalam membentuk dukungan internasional untuk konflik ini. Gerakan seperti Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) mendapatkan dukungan internasional yang signifikan, sementara pemerintah Israel dan pendukungnya meluncurkan kampanye untuk melawan upaya BDS. Kedua belah pihak menyadari kekuatan opini publik global dan berinvestasi besar dalam advokasi, lobi, dan inisiatif pendidikan untuk membangun dan mempertahankan dukungan internasional untuk tujuan mereka (Hendrix, 2024).

Hubungan antara Afrika dan Palestina berakar pada konteks historis, politik, dan ideologis. Banyak negara Afrika meraih kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20 bersamaan dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap perjuangan Palestina. Pengalaman bersama melawan kolonialisme menciptakan rasa solidaritas di mana para pemimpin Afrika melihat perjuangan Palestina sebagai cerminan dari perjuangan mereka sendiri melawan kekuatan kolonial (Murray & Greenstein, 1996). Selama Perang Dingin, banyak negara Afrika beraliansi dengan Gerakan Non-Blok yang mencakup beberapa negara Arab yang mendukung Palestina. Aliansi ini membantu memperkuat dukungan Afrika terhadap perjuangan Palestina di forum-forum internasional seperti PBB. Banyak negara Afrika juga menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina; Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) memiliki kedutaan di beberapa negara Afrika begitu juga sebaliknya memperkuat dukungan politik (Murray & Greenstein, 1996). Beberapa negara Afrika juga memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan kepada Palestina sebagai cerminan komitmen mereka dalam mendukung rakyat Palestina.

Opini publik di banyak negara Afrika cenderung bersimpati terhadap perjuangan Palestina; hal ini sering tercermin dalam aktivitas organisasi masyarakat sipil serta kelompok agama yang memperjuangkan hak-hak Palestina. Meskipun dukungan historis tetap kuat, ada beberapa perubahan nuansa seperti beberapa negara Afrika menjalin hubungan lebih erat dengan Israel demi keuntungan ekonomi dan teknologi. Namun sentimen dukungan luas untuk Palestina tetap signifikan di seluruh benua; kombinasi dari hubungan historis serta pengalaman bersama dalam kolonialisme menegaskan dukungan mendalam banyak negara Afrika terhadap Palestina (Murray & Greenstein, 1996). Kesamaan budaya dan sosial antara negara-negara Afrika dan Palestina berkontribusi signifikan terhadap dukungan terhadap Palestina di seluruh benua Afrika. Berbagai organisasi masyarakat sipil termasuk LSM kelompok aktivis serta organisasi keagamaan memainkan peran penting dalam membentuk opini publik di Afrika; kelompok-kelompok ini sering mengadvokasi hak-hak Palestina serta mengorganisir kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai perjuangan Palestina (Clarno, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh Palestina dan Israel melalui media internasional mempengaruhi opini publik global, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan adil di wilayah tersebut. Dengan menganalisis peran media dan organisasi internasional dalam konflik ini, studi ini berharap dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana negara Afrika Selatan menggunakan media dan organisasi internasional sebagai alat untuk memperjuangkan tujuan politik mereka dan dampaknya terhadap dinamika internasional yang lebih luas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan prosedur selanjutnya yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan. Penelitian deskriptif menggambarkan semua data atau keadaan subjek serta objek yang dianalisis dan dibandingkan dengan realitas. Analisis mendalam terhadap studi kasus Palestina-Israel menunjukkan bahwa konflik yang berlangsung selama beberapa dekade tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik dan sejarah, tetapi juga oleh peran media dan organisasi internasional dalam membentuk opini global.

sumber data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai dokumen resmi pemerintah pusat maupun daerah, laporan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur akademik seperti buku dan jurnal. Selain itu, berita dari berbagai media daring turut menjadi sumber utama dalam mengkaji peran Afrika Selatan dalam mempengaruhi masyarakat global melalui media dan organisasi internasional, khususnya dalam studi kasus konflik Palestina-Israel. Seluruh data diakses secara daring untuk memastikan relevansi dan keterbaruan informasi yang digunakan dalam analisis. Penggunaan data sekunder ini menjadi penting dalam memahami bagaimana Afrika Selatan memanfaatkan media global dan forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Internasional (ICJ), untuk membentuk opini publik serta menekan kebijakan internasional terkait Palestina-Israel.

Pengumpulan data dengan teknik telaah pustaka dilakukan dengan meneliti berbagai buku, jurnal, dan artikel yang membahas peran Afrika Selatan dalam mempengaruhi masyarakat global melalui media dan organisasi internasional, khususnya dalam studi kasus konflik Palestina-Israel. Telaah pustaka ini mencakup analisis terhadap kebijakan luar negeri Afrika Selatan, sikap politiknya dalam forum global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta bagaimana media dan wacana publik di negara tersebut membentuk opini internasional mengenai konflik ini. Selain itu, berbagai publikasi yang membahas sejarah solidaritas Afrika Selatan terhadap Palestina sejak era apartheid juga dikaji untuk memahami kontinuitas sikap politik dan diplomasi negara tersebut dalam membela hak-hak Palestina. Melalui teknik ini, penelitian dapat menggali bagaimana Afrika Selatan menggunakan berbagai platform internasional, seperti PBB, Gerakan Non-Blok, dan Uni Afrika, untuk mengadvokasi hak-hak Palestina serta mengancam kebijakan Israel.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami bagaimana Afrika Selatan memainkan peran dalam membentuk opini global terkait konflik Palestina-Israel.

Analisis ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber, seperti pernyataan resmi pemerintah Afrika Selatan, pemberitaan media, serta aktivitas diplomasi negara tersebut di organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Afrika (UA). Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha mengungkap strategi dan narasi yang digunakan Afrika Selatan dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat global. Afrika Selatan telah aktif memanfaatkan media dan organisasi internasional sebagai instrumen diplomasi untuk memengaruhi opini publik dunia dalam konflik Palestina-Israel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Afrika Selatan: Konteks Politik dan Sosial

Sejarah Afrika Selatan adalah kisah yang panjang dan kompleks, dimulai dengan suku Khoikhoi dan San sebagai penduduk asli yang hidup sebagai pemburu-pengumpul. Pada abad ke-17, pemukim Belanda tiba di Tanjung Harapan dan mendirikan Cape Colony pada tahun 1652, yang memicu konflik dengan Inggris yang menguasai wilayah tersebut pada tahun 1795. Pada tahun 1910, Uni Afrika Selatan dibentuk, menggabungkan beberapa koloni di bawah pemerintahan Kerajaan Inggris dengan dominasi politik oleh minoritas kulit putih (BBC NEWS, 2011). Era apartheid dimulai pada tahun 1948 ketika Partai Nasional menerapkan kebijakan segregasi rasial yang ketat, mencabut hak-hak warga kulit hitam. Kongres Nasional Afrika (ANC) memimpin perjuangan melawan apartheid dan pada tahun 1994, pemilu demokratis pertama diadakan, di mana ANC memenangkan mayoritas dan Nelson Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama (Official Guide to South Africa, 2023). Meskipun telah terjadi kemajuan pasca-apartheid, tantangan seperti kemiskinan, kejahatan, dan korupsi masih ada, dan kritik muncul terhadap pemerintah ANC atas cara mereka menangani masalah ini (Larson Zeb, 2019). Afrika Selatan juga menjadi anggota pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1994, yang membentuk kebijakan luar negerinya untuk mendorong kerja sama multilateral dan menghindari keterikatan dalam persaingan global (Dirco, 2024). Dalam konteks konflik Israel-Palestina, hubungan antara gerakan anti-apartheid dan pembebasan Palestina telah berlangsung lama. Nelson Mandela pernah menyatakan bahwa kebebasan Afrika Selatan "tidak lengkap tanpa kebebasan rakyat Palestina," dan pemerintah ANC saat ini mempertahankan posisi pro-Palestina dengan mengajukan kasus genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional (Bibas, 2024). Dukungan publik terhadap perjuangan Palestina sangat kuat di Afrika Selatan, dengan banyak warga aktif berpartisipasi dalam kampanye solidaritas. Tindakan pemerintah ini mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk mendukung hak-hak Palestina di panggung internasional (Pontarelli, 2024).

Hubungan Bilateral Afrika Selatan dengan Palestina

Setelah Afrika Selatan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1994, negara ini secara resmi membuka hubungan diplomatik dengan Palestina pada tanggal 15 Februari 1995, menandai komitmen kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina (Isilow, 2019). Hubungan ini dipengaruhi oleh solidaritas historis antara rakyat Afrika Selatan dan Palestina yang telah terjalin selama perjuangan anti-apartheid. Nelson Mandela, presiden saat itu, memiliki hubungan erat dengan Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina

(PLO), dan sering menggambarkan Arafat sebagai "kawan seperjuangan," mengakui bahwa kebebasan Afrika Selatan tidak lengkap tanpa kemerdekaan Palestina (Muhammad, 2023). Setelah pembukaan hubungan diplomatik, kedua negara terus meningkatkan kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Tahun 2020, mereka menandatangani perjanjian kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk memperbaiki kondisi masyarakat Palestina. Afrika Selatan juga menolak keputusan Uni Afrika yang memberikan status pengamat kepada Israel dan berkomitmen untuk mendukung inisiatif internasional yang memfokuskan kembali agenda tentang Palestina (Ekip, 2021). Dukungan ini tercermin dalam berbagai aksi dan pernyataan, termasuk langkah Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atas dugaan genosida di Jalur Gaza. Presiden Cyril Ramaphosa menegaskan bahwa ANC selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Peran Media Afrika Selatan

Setelah Afrika Selatan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1994, negara ini secara resmi membuka hubungan diplomatik dengan Palestina pada tanggal 15 Februari 1995, menandai komitmen kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina (Isilow, 2019). Hubungan ini dipengaruhi oleh solidaritas historis antara rakyat Afrika Selatan dan Palestina yang telah terjalin selama perjuangan anti-apartheid. Nelson Mandela, presiden saat itu, memiliki hubungan erat dengan Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dan sering menggambarkan Arafat sebagai "kawan seperjuangan," mengakui bahwa kebebasan Afrika Selatan tidak lengkap tanpa kemerdekaan Palestina (Muhammad, 2023). Setelah pembukaan hubungan diplomatik, kedua negara terus meningkatkan kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pada tahun 2020, mereka menandatangani perjanjian kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk memperbaiki kondisi masyarakat Palestina. Kerja sama ini mencakup program pertukaran pelajar dan pengiriman tenaga medis untuk membantu dalam menangani masalah kesehatan yang mendesak.

Kedua negara sepakat untuk mengadakan konferensi tahunan untuk membahas isu-isu strategis dan penguatan solidaritas. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Naledi Pandor, telah melakukan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Malki, untuk memperkuat hubungan bilateral (Ekip, 2021). Afrika Selatan juga menolak keputusan Uni Afrika yang memberikan status Israel sebagai pengamat. Mereka berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang bertujuan memfokuskan kembali agenda internasional tentang Palestina dan Proses Perdamaian Timur Tengah. Afrika Selatan menegaskan kembali dukungan jangka panjang dan prinsipnya untuk rakyat Palestina, termasuk menuntut pembentukan hukum dari sebuah Negara Palestina yang merdeka, berdaulat penuh, dan layak dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya sesuai dengan perbatasan yang ada pada tanggal 4 Juni 1967 (Ekip, 2021). Dukungan Afrika Selatan terhadap Palestina juga tercermin dalam berbagai aksi dan pernyataan. Presiden Cyril Ramaphosa telah menegaskan sikap partai terhadap masalah Palestina, mengatakan bahwa ANC selalu berdiri berdampingan dengan rakyat Palestina dalam perjuangan mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Afrika Selatan juga menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan genosida yang dilakukan di Jalur Gaza, menunjukkan komitmen kuat untuk

melindungi hak asasi manusia dan menghentikan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Media Afrika Selatan memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai isu-isu ini. Media sering kali mencerminkan keprihatinan masyarakat dan narasi yang disampaikan oleh pemerintah (The South African Institute of International Affairs, 2024). Namun, liputan media mengenai konflik Israel-Palestina sering kali mendapat kritik karena dianggap partisan dan kurang bernuansa. Pemberitaan cenderung berpihak pada Palestina atau terlalu sederhana dalam membongkar konflik sebagai “pertempuran lama yang rumit” tanpa mengeksplorasi penyebab mendasar (Jimoh, 2023a). Selain itu, pendekatan media yang berfokus pada kekerasan mengabaikan perjuangan sehari-hari masyarakat yang terkena dampak. Media di Afrika Selatan berbeda dengan media internasional yang sering dianggap bias terhadap Israel. Laporan-laporan internasional sering kali menekankan jatuhnya korban di pihak Israel dan meremehkan penderitaan warga Palestina (Khoury, 2024).

Penggambaran media mengenai konflik ini dibentuk oleh ikatan sejarah antara apartheid di Afrika Selatan dan pendudukan Israel. Kasus hukum yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional mencerminkan warisan dukungan Nelson Mandela terhadap perjuangan Palestina (Imray, 2024). Interaksi Mandela dengan para pemimpin Palestina menumbuhkan narasi penindasan dan perlawanan terhadap kolonialisme. Media sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik mengenai konflik Israel-Palestina di Afrika Selatan. Platform seperti Twitter dan Facebook memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara langsung dari mereka yang terkena dampak konflik dan memperkuat aktivisme publik (Mier, 2024). Namun, penyebaran informasi yang salah di media sosial dapat mempersulit pemahaman masyarakat mengenai situasi tersebut. Secara keseluruhan, dukungan Afrika Selatan terhadap Palestina sangat terkait dengan sejarah apartheid di negara tersebut. Kongres Nasional Afrika (ANC) terus memperjuangkan hak-hak Palestina dengan menyamakan perjuangan mereka dengan pengalaman warga kulit hitam Afrika Selatan di bawah apartheid. Solidaritas ini tercermin dalam pernyataan publik dari para pemimpin politik serta liputan media yang menyoroti dampak kemanusiaan dari konflik tersebut. Dengan demikian, Afrika Selatan tidak hanya berperan sebagai pendukung hak-hak Palestina tetapi juga sebagai suara penting dalam wacana internasional mengenai keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Keterlibatan Afrika Selatan dalam Organisasi Internasional

Afrika Selatan telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mendukung Palestina melalui berbagai organisasi internasional, terutama dalam konteks konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Dukungan ini berakar dari konteks sejarah solidaritas yang mendalam, yang berasal dari perjuangan panjang Afrika Selatan melawan apartheid, sebuah masa ketika rakyatnya sendiri mengalami penindasan yang sistematis dan brutal. Pengalaman sejarah ini telah membentuk cara pandang dan kebijakan luar negeri Afrika Selatan, khususnya dalam melihat perjuangan Palestina sebagai kelanjutan dari perjuangan global melawan penindasan dan ketidakadilan. Dalam beberapa bulan terakhir, Afrika Selatan telah menunjukkan komitmennya terhadap Palestina melalui tindakan konkret di forum internasional. Salah satu tindakan yang paling signifikan adalah pengajuan kasus di Mahkamah Internasional (ICJ), di mana Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida terkait tindakannya di Gaza.

Langkah hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mencerminkan tekad Afrika Selatan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Langkah ini juga memperlihatkan bagaimana Partai Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa telah lama melihat perjuangan Palestina sebagai sesuatu yang sejalan dengan perjuangan historis mereka melawan apartheid. Presiden Cyril Ramaphosa, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa "kebebasan kami sendiri sebagai Afrika Selatan tidak akan lengkap tanpa kebebasan Palestina." Pernyataan ini memperjelas bahwa dalam pandangan Afrika Selatan, perjuangan untuk kebebasan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu di dalam negeri maupun di tingkat global (The Economist, 2024).

Komitmen Afrika Selatan untuk Palestina tidak hanya terbatas pada tindakan hukum di ICJ, tetapi juga terlihat dalam advokasi aktifnya di berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ronald Lamola, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan yang baru, telah menegaskan kembali dedikasi negaranya untuk memperjuangkan hak-hak Palestina di dalam institusi global ini. Dalam pidato dan pernyataan publiknya, Lamola menekankan pentingnya multilateralisme sebagai alat untuk mencapai tujuan mengakhiri apartheid dan genosida terhadap Palestina. Afrika Selatan, melalui pendekatan ini, berusaha untuk menggalang dukungan internasional bagi Palestina, serta mendorong komunitas global untuk bertindak lebih tegas dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan wilayah Palestina lainnya.

Hubungan antara Afrika Selatan dan Palestina memiliki akar yang dalam, yang terbentuk sejak masa gerakan anti-apartheid. Selama masa tersebut, Nelson Mandela dan ANC membangun hubungan yang erat dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), melihat perjuangan mereka sebagai perjuangan yang saling terkait. Solidaritas historis ini terus mempengaruhi kebijakan luar negeri Afrika Selatan hingga hari ini, di mana negara ini berusaha memanfaatkan pengalamannya dalam mendukung Palestina dalam upaya mereka untuk mencapai penentuan nasib sendiri. Mandela sendiri, dalam banyak pidatonya, sering mengaitkan nasib rakyat Palestina dengan nasib rakyat Afrika Selatan di bawah apartheid, menciptakan ikatan emosional dan politik yang masih bertahan hingga saat ini (Orderson, 2024). Namun, tindakan dan posisi Afrika Selatan ini tidak luput dari kontroversi dan kritik. Di satu sisi, banyak pihak yang mendukung langkah-langkah hukum dan diplomatik Afrika Selatan, menganggapnya sebagai sikap yang berani dalam menghadapi ketidakadilan yang dianggap nyata. Mereka berpendapat bahwa tindakan ini mencerminkan komitmen mendalam Afrika Selatan untuk membela hak-hak rakyat Palestina dan memperjuangkan keadilan di panggung internasional. Di sisi lain, ada juga kritik yang muncul, yang menyoroti potensi inkonsistensi dalam kebijakan luar negeri Afrika Selatan, terutama mengingat hubungan diplomatiknya dengan beberapa tokoh dan rezim yang juga kontroversial. Kritikus ini berargumen bahwa pendekatan Afrika Selatan mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sering mereka gaungkan di berbagai forum internasional (Bibas, 2024).

Komitmen Afrika Selatan terhadap Palestina tetap menjadi aspek yang menonjol dalam strategi hubungan internasionalnya. Ini mencerminkan keinginan yang lebih luas untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Afrika Selatan, dengan pengalaman sejarahnya sendiri, berusaha untuk

menjadi suara bagi mereka yang mengalami penindasan dan ketidakadilan, baik itu di Palestina maupun di tempat lain. Melalui tindakan hukum, advokasi di forum internasional, dan hubungan diplomatik yang erat dengan pemimpin Palestina, Afrika Selatan terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pendukung terkuat bagi perjuangan Palestina di tingkat global. Langkah-langkah ini, meskipun tidak selalu tanpa tantangan dan kontroversi, menunjukkan komitmen mendalam negara ini untuk memastikan bahwa suara-suara yang tertindas didengar dan hak-hak mereka diperjuangkan, di mana pun mereka berada (Al Jazeera, 2023).

Meningkatnya ketegangan di Gaza, Afrika Selatan terus memainkan peran yang signifikan dalam membangun solidaritas internasional bagi Palestina. Melalui aksi-aksi seperti pengajuan kasus di ICJ, Afrika Selatan tidak hanya menunjukkan dukungan simbolis, tetapi juga mengambil langkah-langkah nyata untuk menuntut keadilan bagi rakyat Palestina. Dukungan ini, yang didorong oleh sejarah panjang solidaritas anti-apartheid, memperlihatkan bagaimana negara ini melihat dirinya sebagai bagian dari perjuangan global melawan ketidakadilan. Dengan latar belakang ini, Afrika Selatan tetap menjadi salah satu pemain kunci dalam upaya global untuk mendukung Palestina dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati oleh komunitas internasional.

Gerakan Boikot Afrika Selatan Terhadap Israel Dalam Membantu Palestine

Aktivisme untuk hak-hak Palestina di Afrika Selatan merupakan gerakan yang kompleks dan luas, melibatkan berbagai organisasi serta individu yang berkomitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Sejak tahun 2005, inisiatif ini telah berkembang pesat, terutama melalui media daring dan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter. Salah satu momen penting dalam gerakan ini adalah Israeli Apartheid Week (IAW) yang diselenggarakan pada tahun 2014, di mana hampir tujuh puluh organisasi berpartisipasi, termasuk gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang menjadi salah satu pendorong utama kampanye ini (Srikanth, 2015). BDS menekankan penindasan yang dialami warga Palestina oleh negara Israel dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menarik investasi mereka dari Israel serta membujuk individu dan lembaga untuk tidak terlibat dalam kolaborasi budaya dan akademis dengan institusi Israel yang terlibat dalam penjajahan. Universitas-universitas di Afrika Selatan, seperti Universitas Cape Town dan Universitas Johannesburg, telah mengambil peran aktif dalam mendukung hak-hak Palestina. Kelompok mahasiswa dari berbagai universitas juga menunjukkan dukungan mereka dengan melakukan protes yang tegas.

Tahun 2011, aktivis mahasiswa di Universitas Johannesburg mengeluarkan pernyataan kuat menentang propaganda Israel dan kunjungan pejabat Israel yang bertujuan memperbaiki citra negara tersebut (Simon, 2000). Selain itu, organisasi perdagangan seperti Congress of South African Trade Unions (COSATU) dan South African Council of Churches (SACC) juga terlibat dalam perlawanan anti-apartheid serta mendukung gerakan BDS. Komunitas Yahudi di Afrika Selatan memiliki sejarah yang kompleks dalam konteks perjuangan anti-apartheid. Banyak anggota komunitas ini terlibat dalam kampanye BDS dan aktivisme pro-Palestina, menyadari bahwa perjuangan mereka memiliki kesamaan dengan pengalaman apartheid di Afrika Selatan. Aktivis BDS mengungkapkan bahwa dukungan terhadap rakyat Palestina berasal dari pengalaman kolektif masyarakat dunia yang pernah bersatu melawan apartheid Afrika Selatan pada tahun 1980-an. Mereka mengorganisir berbagai acara untuk meningkatkan kesadaran akan kebijakan rasis di Afrika

Selatan dan membangun dukungan untuk kampanye boikot (BDS South Africa, 2015).

Banyak organisasi pro-Palestina di Afrika Selatan tergabung dalam Palestine Solidarity Alliance, yang mendukung perjuangan untuk negara Palestina yang bebas dan demokratis. Aliansi ini terinspirasi oleh Revolusi Demokratik Nasional Afrika Selatan dan Gerakan Anti-Apartheid Internasional. Pada bulan Februari 2012, SACC mengeluarkan surat kepada semua gereja di Afrika Selatan untuk menyerukan dukungan bagi Palestina dalam perjuangan mereka melawan Israel. Dalam surat tersebut, SACC menyatakan bahwa situasi di Palestina mirip dengan pengalaman apartheid di Afrika Selatan, di mana orang-orang non-Yahudi Palestina mengalami diskriminasi dan pengusiran dari tanah mereka (South African Council of Churches on BDS South Africa, 2012). Secara keseluruhan, gerakan BDS di Afrika Selatan mencerminkan solidaritas yang kuat dengan rakyat Palestina. Dengan memanfaatkan pelajaran dari sejarah perjuangan anti-apartheid, gerakan ini berupaya memperjuangkan resistensi non-berdarah terhadap pendudukan Israel. Melalui berbagai kampanye dan aksi, gerakan ini terus mendorong Israel untuk mematuhi hukum internasional serta mempromosikan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi rakyat Palestina. Aktivisme ini tidak hanya menjadi suara bagi rakyat Palestina tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya solidaritas global dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan.

3.2 Pembahasan

Afrika Selatan, dalam perannya sebagai advokat yang vokal untuk hak-hak Palestina, telah menggunakan berbagai alat untuk mempengaruhi opini publik baik di tingkat domestik maupun internasional. Salah satu cara utama adalah melalui media massa dan kerjasama dengan institusi internasional seperti International Criminal Court (ICC). Dalam konteks teori konstruktivisme, pendekatan ini tidak hanya didasarkan pada kekuatan material atau ekonomi, tetapi juga pada kekuatan ideatif dan naratif yang dihasilkan melalui interaksi sosial dan norma-norma internasional. Melalui media massa, Afrika Selatan telah berhasil membentuk narasi yang kuat mengenai konflik Israel-Palestina. Narasi ini seringkali berfokus pada kemiripan antara perjuangan rakyat Palestina dan sejarah perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan. Narasi ini, yang diartikulasikan melalui berbagai saluran media, telah berhasil menciptakan kesadaran publik yang luas tentang isu-isu hak asasi manusia yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Dalam teori konstruktivisme, media massa memainkan peran penting sebagai agen sosial yang membentuk identitas kolektif dan persepsi publik. Melalui media, Afrika Selatan tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga membentuk norma-norma sosial tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dalam konteks internasional. Dalam teori konstruktivisme, media massa memainkan peran penting sebagai agen sosial yang membentuk identitas kolektif dan persepsi publik. Melalui media, Afrika Selatan tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga membentuk norma-norma sosial tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dalam konteks internasional.

Penggunaan media massa oleh Afrika Selatan juga dapat dipahami dalam kerangka konsep "anarki sosial" yang dikemukakan oleh Alexander Wendt. Dalam pandangan ini, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk konstruksi sosial yang mempengaruhi bagaimana masyarakat internasional melihat dan menilai konflik Israel-Palestina. Narasi tentang pelanggaran hak asasi manusia

oleh Israel, yang disebarkan melalui media Afrika Selatan, membantu membentuk opini publik global dan menciptakan tekanan internasional terhadap Israel. Selain melalui media, Afrika Selatan juga menggunakan kerjasama dengan ICC sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik internasional. Tindakan hukum yang diambil oleh Afrika Selatan, seperti pengajuan kasus ke ICC yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza, bukan hanya langkah hukum tetapi juga alat politik yang kuat. Tindakan ini memperkuat narasi bahwa Israel adalah negara yang melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, dan bahwa komunitas internasional harus bertindak untuk mengakhiri situasi ini. Kerjasama dengan ICC ini memperlihatkan bagaimana Afrika Selatan menggunakan mekanisme internasional untuk memperkuat posisinya dan membentuk opini publik global. Dalam konteks konstruktivisme, langkah ini menggambarkan bagaimana norma-norma internasional, seperti keadilan dan hak asasi manusia, dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk perilaku negara dan mempengaruhi opini publik. Melalui kerjasama dengan ICC, Afrika Selatan menekankan pentingnya penegakan hukum internasional dan berusaha untuk mengkonstruksi realitas internasional di mana tindakan Israel di Gaza dianggap sebagai tindakan genosida yang harus dihukum.

Peran historis dan ideologis Afrika Selatan dalam mendukung Palestina juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Seperti yang dijelaskan oleh Wendt, identitas dan sejarah bersama memainkan peran kunci dalam interaksi internasional. Afrika Selatan, yang memiliki sejarah panjang melawan apartheid, melihat perjuangan Palestina sebagai perpanjangan dari perjuangan melawan penindasan. Identitas ini membentuk kebijakan luar negeri Afrika Selatan dan menciptakan solidaritas yang kuat dengan rakyat Palestina. Ini juga tercermin dalam cara media Afrika Selatan meliput konflik tersebut, seringkali dengan perspektif yang simpatik terhadap Palestina. Dengan demikian, melalui media massa, kerjasama dengan ICC, dan identitas ideologis yang kuat, Afrika Selatan berhasil mempengaruhi opini publik tentang konflik Israel-Palestina. Pendekatan ini tidak hanya didasarkan pada kekuatan material tetapi juga pada kekuatan ideatif dan konstruksi sosial yang membentuk persepsi dan norma internasional. Dengan memahami bagaimana konstruksi sosial dan norma mempengaruhi dukungan internasional untuk Palestina, kita dapat lebih memahami dinamika konflik dan upaya penyelesaiannya di panggung global.

Sejak era apartheid, Afrika Selatan telah membangun reputasi sebagai negara yang menentang penindasan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Setelah berakhirnya apartheid, pemerintah Afrika Selatan, terutama di bawah kepemimpinan Nelson Mandela dan African National Congress (ANC), terus mendukung hak-hak Palestina sebagai bagian dari solidaritas global terhadap penindasan. Hal ini sejalan dengan prinsip konstruktivisme, di mana identitas dan norma-norma yang terbentuk dari sejarah dan pengalaman politik masa lalu memengaruhi perilaku dan kebijakan negara. Identitas Afrika Selatan sebagai bekas negara yang terjajah memberi mereka dorongan moral untuk mendukung Palestina, yang juga dipandang sebagai bangsa yang sedang berjuang untuk meraih kebebasan dan keadilan.

Media massa di Afrika Selatan sering mencerminkan pandangan ini dengan memberitakan konflik Israel-Palestina melalui lensa yang mendukung Palestina, menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel. Media berfungsi sebagai alat untuk memperkuat narasi identitas nasional Afrika Selatan

yang pro-Palestina, mengarahkan opini publik untuk mendukung perjuangan Palestina. Penggunaan narasi ini sejalan dengan teori konstruktivisme, yang menunjukkan bagaimana norma dan ide membentuk tindakan internasional dan bagaimana negara-negara seperti Afrika Selatan menggunakan media untuk membentuk persepsi global.

Kerjasama Afrika Selatan dengan International Criminal Court (ICC) juga mencerminkan pendekatan konstruktivis. Afrika Selatan, sebagai anggota ICC, memiliki kewajiban untuk mendukung penegakan hukum internasional, termasuk dalam isu-isu terkait kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina. Dukungan ini merupakan perpanjangan dari komitmen mereka terhadap norma-norma global tentang keadilan dan hak asasi manusia, yang telah menjadi bagian integral dari identitas nasional mereka sejak jatuhnya apartheid. Dalam konteks kepentingan nasional, kerjasama dengan ICC dapat dilihat sebagai cara bagi Afrika Selatan untuk mempertahankan identitasnya sebagai pemimpin moral di panggung internasional, memperkuat posisinya sebagai pendukung hak-hak rakyat yang tertindas. Afrika Selatan menggunakan kerjasama ini untuk menekan Israel di panggung internasional, mendorong agar Israel dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya di Palestina.

Afrika Selatan juga merupakan bagian dari Gerakan Non-Blok (GNB), yang secara historis menolak penjajahan dan intervensi asing. GNB, yang didirikan pada puncak Perang Dingin, berusaha untuk mempromosikan kemandirian politik dan ekonomi bagi negara-negara dunia ketiga, yang banyak di antaranya sedang berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme. Palestina, yang telah berulang kali meminta dukungan dari GNB, sering kali mendapatkan solidaritas dari anggota GNB, termasuk Afrika Selatan, yang melihat perjuangan Palestina sejalan dengan tujuan anti-kolonialisme GNB. Sejarah apartheid di Afrika Selatan menambah kedalaman solidaritas ini. Selama era apartheid, Afrika Selatan menghadapi diskriminasi rasial yang dilembagakan, mirip dengan yang dialami oleh Palestina di bawah pendudukan Israel. Setelah mengakhiri apartheid, Afrika Selatan terus mengidentifikasi dirinya dengan perjuangan rakyat Palestina, menganggapnya sebagai kelanjutan dari perjuangan mereka sendiri melawan penindasan dan ketidakadilan. Kesesuaian nilai antara perjuangan rakyat Palestina dan sejarah perjuangan Afrika Selatan menegaskan dukungan kuat dari Afrika Selatan terhadap Palestina. Seperti Afrika Selatan yang merdeka dari apartheid, Palestina juga berusaha untuk melepaskan diri dari apa yang mereka lihat sebagai bentuk baru dari kolonialisme dan penindasan. Dukungan Afrika Selatan terhadap Palestina dapat dipahami sebagai bagian dari kepentingan nasional yang lebih besar, yang mencakup promosi hak asasi manusia dan keadilan di seluruh dunia.

Analisis ini, teori konstruktivisme membantu menjelaskan bagaimana identitas, norma, dan sejarah memengaruhi kebijakan luar negeri Afrika Selatan dan hubungannya dengan Palestina. Ini juga menunjukkan bagaimana kepentingan nasional, yang didefinisikan oleh identitas politik, budaya, dan sejarah, memandu tindakan internasional, termasuk dalam kerja sama dengan ICC dan penggunaan media untuk mempengaruhi opini publik. Dengan demikian, Afrika Selatan tidak hanya berperan sebagai pendukung diplomatik bagi Palestina tetapi juga sebagai suara moral yang kuat di panggung internasional, mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina melalui media massa dan lembaga-lembaga internasional seperti ICC.

4. Kesimpulan

Afrika Selatan telah menunjukkan peran penting dalam mendefinisikan posisinya di arena global dengan menyoroti solidaritasnya terhadap Palestina. Di bawah kepemimpinan Presiden Cyril Ramaphosa, negara ini aktif dalam mengejar kebijakan luar negeri yang mendukung hak-hak Palestina. Protes besar-besaran di Johannesburg dan Cape Town mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan internasional, terutama kritik terhadap dukungan AS terhadap Israel. Pemerintah Afrika Selatan juga telah mengambil langkah hukum signifikan dengan mengajukan kasus di Mahkamah Internasional (ICC) menuduh Israel melakukan genosida terhadap Palestina, yang menegaskan komitmen negara ini terhadap keadilan internasional. Media Afrika Selatan, termasuk The Sowetan, memainkan peran krusial dalam membentuk opini publik dengan menyoroti penderitaan warga Palestina dan membandingkannya dengan pengalaman apartheid di negara tersebut. Penekanan pada narasi kemanusiaan dan hak asasi manusia menunjukkan pengaruh historis perjuangan anti-apartheid terhadap sikap saat ini terhadap konflik Israel-Palestina. Kritik terhadap bias media internasional juga memperjelas perbedaan pandangan antara Afrika Selatan dan negara-negara Barat dalam meliput konflik ini. Solidaritas Afrika Selatan dengan Palestina didorong oleh pengalaman historis dan perjuangan melawan penindasan. Dukungan ini terlihat dalam tindakan nyata, seperti protes, aksi hukum, dan upaya aktivis untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Dengan terus menegaskan posisi yang mendukung hak-hak Palestina di panggung global, Afrika Selatan menunjukkan dedikasi yang mendalam terhadap keadilan internasional dan kemanusiaan, memperkuat perannya sebagai pendukung utama dalam diskusi global mengenai Palestina.

Daftar Pustaka

- Al Jazeera. (2023). South Africa's historic support for Palestine. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2023/12/28/south-africas-historic-support-for>
- Azraq, S. (2018). "What Can I Do?": A Guide for Academics Who (Want to) Support Palestine. *Springer EBooks*, 225–243. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00716-4_10
- BBC NEWS. (2011, July 9). *South Africa profile—Timeline*. <https://www.bbc.com/news/world-africa-14094918>
- BDS South Africa. (2015, February 17). *Join The 11th International Israeli Apartheid Week*. <http://ymlp.com/zL9xsU>
- Bibas, B. (2024, June 6). Why South Africa is fighting for Palestine in The Hague. *JusticeInfo.Net*. <https://www.justiceinfo.net/en/132802-why-south-africa-fighting-for-palestine-the-hague.html>
- Center for Preventive Action. (2024). Israeli-Palestinian Conflict. *Global Conflict Tracker*. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict>
- Clarno, A. (2017). South Africa and Palestine/Israel. *Neoliberal Apartheid*, 24–53. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226430126.003.0002>

- Dirco. (2024). *President Ramaphosa to attend the 19th Non-Aligned Movement (NAM) Summit in Uganda*. <https://dirco.gov.za/president-ramaphosa-to-attend-the-19th-non-aligned-movement-nam-summit-in-uganda/>
- Ekip. (2021, October 9). Afrika Selatan dan Palestina berkomitmen perkuat hubungan bilateral. *Anadolu Ajansi*. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/afrika-selatan-dan-palestina-berkomitmen-perkuat-hubungan-bilateral/2387080>
- Frieden, J. (2016). *The Root Causes of Enduring Conflict: Can Israel and Palestine Co-exist*. [Www.hks.harvard.edu](http://www.hks.harvard.edu). <https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/root-causes-enduring-conflict-can-israel-and-palestine-co-exist>
- Hendrix, J. (2024, January 7). Evaluating Social Media's Role in the Israel-Hamas War. *Tech Policy Press*. <https://www.techpolicy.press/evaluating-social-medias-role-in-the-israelhamas-war/>
- Imray, G. (2024). Mandela's support for Palestinians endures with South Africa's genocide case against Israel. *AP News*. <https://apnews.com/article/south-africa-palestine-israel-genocide-mandela-arafat-39d222b9dd65994c4c13730efabe8815#>
- Isilow, H. (2019, February 20). Natural allies: South Africa and Palestine. *Anadolu Ajansi*. <https://www.aa.com.tr/en/africa/natural-allies-south-africa-and-palestine/1398344>
- Jimoh, A. (2023a, November 1). How the African Media Views the Israel-Gaza War—Media Diversity Institute. *Media Diversity Institute - Media Diversity Institute*. <https://www.media-diversity.org/how-the-african-media-views-the-israel-gaza-war/>
- Khouri, R. G. (2024). Watching the watchdogs: Law, Propaganda, and the Media walk into a bar. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/1/23/watching-the-watchdogs-law-propaganda-and-the-media-walk-into-a-bar>
- Larson Zeb. (2019, August). South Africa: Twenty-Five Years Since Apartheid. *Origins*. <https://origins.osu.edu/article/south-africa-mandela-apartheid-ramaphosa-zuma-corruption>
- Mier, A. (2024). War in Palestine and its Impact on Western countries. *Global Affairs and Strategic Studies*. <https://www.unav.edu/web/global-affairs/war-in-palestine-and-its-impact-on-western-countries>
- Muhammad, M. (2023, December 5). Mandela, Arafat, dan Solidaritas kepada Rakyat Palestina. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/12/05/mandela-arafat-dan-solidaritas-kepada-rakyat-palestina>
- Murray, M. J., & Greenstein, R. (1996). Genealogies of Conflict: Class, Identity, and State in Palestine/Israel and South Africa. *Contemporary Sociology*, 25(6), 745. <https://doi.org/10.2307/2077262>
- Official Guide to South Africa. (2023). *History | South African Government*. <https://www.gov.za/about-sa/history>

- Orderson, C. (2024, January 16). Altruism, opportunism or both: What pushed South Africa to ICJ over Gaza? *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/features/2024/1/16/altruism-opportunism-or-both-what-pushed-south-africa-to-icj-over-gaza>
- Pinto, M. (2024). *Opinion-The International Community Should End the Israel-Hamas War*. <https://www.e-ir.info/2024/03/08/opinion-the-international-community-should-end-the-israel-hamas-war/>
- Pontarelli, F. (2024). *Rooted in Resistance: Historical Perspectives on South Africa–Palestine Solidarity – a Conversation with Professor Salim Vally*. <https://doi.org/10.1163/26667185-bja10060>
- Salma. (2023, October). Palestine-Israel Conflict Heats Up, Indonesia Remains Consistent in Supporting Palestine. *Universitas Gajah Mada*. <https://ugm.ac.id/en/news/palestine-israel-conflict-heats-up-indonesia-remains-consistent-in-supporting-palestine/>
- Simon, A. (2000). That Spells Trouble’: Jews and the Communist Party of South Africa. *Journal of Southern African Studies*, 62–145. <https://doi.org/10.1080/030570700108423>
- Sky News. (2024, June 23). Israel-Hamas war latest: Netanyahu says “intense fighting” phase ending in Gaza but war not over. *Sky News*. <https://news.sky.com/story/israel-hamas-gaza-latest-ceasefire-biden-announcement-sky-news-live-blog-12978800>
- South African Council of Church on BDS South Africa. (2012). *IAW - A letter from the SA Council of Churches to all Churches in SA*. <https://www.bdsmovement.net/news/iaw-letter-sa-council-churches-all-churches-sa>
- Srikanth, R. (2015). South African Solidarity with Palestinians: Motivations, Strategies, and Impact and Impact. *NEW ENGLAND JOURNAL OF PUBLIC POLICY*, 27(1), 1–23. <https://scholarworks.umb.edu/nejpp/vol27/iss1/3/>
- The Economist. (2024). South Africa’s support for the Palestinian cause has deep roots. *The Economist*. <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2024/01/11/south-africas-support-for-the-palestinian-cause-has-deep-roots>
- The South African Institute of International Affairs. (2024). New survey reveals how South Africa’s foreign policy priorities stack up against those of its peers. *SAIIA*. <https://saiia.org.za/news/new-survey-reveals-how-south-africas-foreign-policy-priorities-stack-up-against-those-of-its-peers/>